

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PUTUSSIBAU 2020



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan di tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 merupakan rencana kinerja tahun pertama yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021. Renja Dinas Perhubungan menggambarkan target kinerja tahun 2021 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja Dinas Perhubungan ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini.

Putussibau, Juni 2020

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. H. ABDUL KARIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19610818 199403 1 003

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Sistematika Penulisan	2
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.....	4
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2019.....	4
	B. Perkiraan Pencapaian Tahun 2020.....	9
	B. Evaluasi Capaian Renstra	14
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	20
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	23
BAB III	TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25
	A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
	B Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.....	30
BAB V	PENUTUP.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016- 2021.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 dengan memperhatikan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Tahun 2021 yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia, peningkatan ekonomi sektor unggulan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan dalam rangka mempersiapkan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Tahun 2021. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Perumusan Program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Perhubungan. Rencana Kerja Tahun 2021 juga dirumus untuk mensikron dalam rangka menunjang visi, misi Kepala Daerah tahun 2021 dengan program dan kegiatan mengacu pada 53 Lokasi Desa Prioritas.

1. 2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 – 2034;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

1. 3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud :

penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

2) Tujuan penyusunan Renja :

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 sesuai tugas pokok dan fungsinya ;

- 2) Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :

- A. Latar Belakang,
- B. Landasan Hukum,
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU terdiri dari:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan perkiraan Tahun 2020 serta Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019
- B. Perkiraan Pencapaian Tahun 2020
- C. Evaluasi Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN terdiri dari :

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan,
- C. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.

BAB V PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2019

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan perkiraan Tahun 2020 serta Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan 2021 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja 2019 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2020. Pada pelaksanaan kegiatan 2019 secara umum Dinas Perhubungan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.

Tujuan pembangunan Dinas Perhubungan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021, Dinas Perhubungan memiliki visi : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih
2. Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Perhubungan disusun dalam kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Dinas Perhubungan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Dinas Perhubungan.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019

Atas dasar telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan maka capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Hal yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup Dinas Perhubungan dengan berbagai program dan kegiatan yang ada.

. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2019 telah terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian % Keuangan	Capaian % Kinerja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.457.122.500,00			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	2.700.000,00	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	69.200.000,00	67.260.053,00	97,20	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan	12.000.000,00	9.953.900	82,95	100
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	96.850.000,00	96.850.000,00	100	100
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	88.157.000,00	88.157.000,00	100	100
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	100	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.148.000,00	38.148.000,00	100	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.695.000,00	41.695.000,00	100	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	7.129.000,00	7.129.000,00	100	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.700.000,00	89.375.000,00	99,64	100
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan	16.560.000,00	16.560.000,00	100	100

	Peraturan Perundang-undangan				
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	48.510.000,00	115.790.000,00	100	100
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	410.206.625,00	555.951.200,00	100	100
14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	201.568.625,00	260.960.000,00	100	100
15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	37.444.500,00	37.444.500,00	100	100
16	Penyusunan RKA dan DPA	2.445.000,00	2.445.000,00	100	100
17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	262.850.000,00	262.850.000,00	100	100
18	Penyediaan Jasa Publikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	100	100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	757.600.000,00			
18	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	354.600.000,00	354.093.000,00	99,86	100
19	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	150.000.000,00	149.268.000,00	99,51	100
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	253.000.000,00	253.000.000,00	100	100
III	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	103.500.000,00			
21	Pendidikan dan pelatihan Formal	103.500.000,00	103.499.200,00	100	100
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	125.066.300,00			

	dan keuangan				
22	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)	6.500.200,00	6.500.200,00	100	100
23	Penyediaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.431.700,00	4.431.700,00	99,06	100
24	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	58.607.000,00	58.107.000,00	99,15	100
25	Penyusunan Rencana Kerja Dishub	49.637.400,00	49.637.400,00	100	100
26	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.890.000,00	5.890.000,00	100	100
VI	Peningkatan Pelayanan Angkutan	838.356..850,00			
26	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	329.484.000,00	329.484.000,00	100	100
27	Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	106.400.000,00	106.358.000,00	99,96	100
28	Manajemen lalu lintas angkutan sungai dan danau	112.516.850,00	112.423.000,00	99,92	100
29	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	44.542.000,00	44.542.000,00	100	100
31	Pemeliharaan/rehabilitas Fasilitas ASDP	207.100.000,00	206.810.000,00	99,86	100
32	Pelayanan KIR Keliling	12.500.000,00	12.500.000,00	100	100
33	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	25.814.000,00	25.814.000,00	100	100
VII	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.375.539.455,00			

34	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal	252.539.455,00	252.386.000,00	99,94	100
35	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	605.000.000,00	604.011.000,00	99,84	100
36	Pembangunan Kapal Ferry Penyeberangan Sungai	2.518.000.000,00	2.505.650.000,00	99,51	100
VIII	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.480.000,00			
37	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	700.000.000,00	699.495.000,00	99,93	100
38	Penyediaan Lampu Jalan Kota	780.000.000,00	679.855.000,00	99,93	100
IX	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00			
37	Pengadaan Alat KIR Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	24.981.000,00	99,92	100
		10.299.005.355,00			

Sumber: Laporan Dinas Perhubungan 2019

Dinas Perhubungan merupakan salah satu SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel II berikut.

Tabel II
Target dan Realisasi PAD Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.000.000,00	58.522.000,00	97,53%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	45.500.000,00	32.630.000,00	71,71%
3	Retribusi Terminal	15.000.000,00	9.208.000,00	61,39%
4	Retribusi Pelabuhan	49.500.000,00	29.700.000,00	60,00%
5	Retribusi Penyeberangan Air	20.000.000,00	49.500.000,00	24%
6	Retribusi Ijin Trayek	10.000.000,00	5.900.000,00	59%
Jum		210.000.000,00	185.460.000,00	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada Tabel III.

Tabel III
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79%	75%
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	70%	75%
		% Angkutan Umum LAIK jalan	85%	80%

B. Perkiraan Pencapaian Tahun 2020

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka program Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan visi dan misi Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang Perhubungan, perlu diterapkan sasaran dan target program yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Sasaran/target program dimaksud dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja (RKA) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan Dinas.

Rencana Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel IV berikut:

Tabel IV
Target Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja	Target
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.276.000,00	Prosentase Surat menyurat	100 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	88.800.000,00	Terbayar Jasa komunikasi, air listrik	12 bulan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi onal untuk menunjang kelancaran pelayanan	5 unit
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.100.000,00	Terbayarnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	17 orang
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	87.960.000,00	Tersedianya penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	9 orang
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	29.900.000,00	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	47 unit
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.102.000,00	Tersedianya kelengkapan alat tulis kantor	12 bulan
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.940.000,00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3.529.000,00	Prosentase tersedianya	100 %

	Kantor		komponen listrik/penerangan bangunan kantor	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	23.800.000,00	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12.000.000,00	Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.600.000,00	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	196.438.100,00	jumlah pegawai rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39 orang
14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	108.780.000,00	Tercapainya jumlah pegawai kunjungan kerja dalam daerah	100 orang
15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	99.850.000,00	Prosentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa	100%
16	Penyusunan RKA dan DPA	2.447.000,00	Tersedianya dokumen RKA dan DPA	3 Dok
17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	289.800.000,00	Tersedianya jasa pendukung kantor	14 orang
18	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000,00	Prosentase Tersedianya jasa publikasi	100 %
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
18	Penyediaan Sarana Pendukung	146.000.000	Prosentase	100%

	Gedung Kantor		tersedianya sarana pendukung kantor	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	215.000.000	Prosentase tersedianya sarana pendukung kantor	100
20	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional	253.000.000,00	Prosentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	100%
III	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur			
21	Pendidikan dan pelatihan Formal	79.000.000,00	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 orang
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
22	Penyusunan LAKIP DISHUB	1.963.000,00	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 dok
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.590.000,00	Tersedianya laporan akhir tahun	1 dok
24	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	36.457.000,00	Tersedianya dokumen pengelolaan aset	2 persil
25	Penyusunan RENJA DISHUB	19.263.000,00	Tersedianya RENJA	1 dok
26	Penyusunan LPPD	2.510.000,00	Tersedianya LPPD	1 dok
V	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
27	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	200.004.000,00	Terselenggaranya Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	12 bulan
28	Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan	113.000.000,00	Terlaksananya Monitoring	12 bulan

	Danau		Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	
29	Manajemen lalu lintas angkutan sungai dan danau	113.000.000,00	Tertibnya Perizinan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	10 ijin
30	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	49.000.000,00	Terpilihnya jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ	3 orang
31	Pemeliharaan/rehabilitas Fasilitas ASDP	38.000.000,00	Terpeliharanya jumlah fasilitas umum ASDP	5 unit
32	Pelayanan KIR Keliling	41.000.000,00	Terselenggaranya jumlah kecamatan yang dilaksanakan KIR keliling	100 unit
33	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	106.000.000,00	Terselenggaranya keamanan hari-hari besar keagamaan dan lokasi parkir	12 bulan
34	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas Darat	19.000.000,00	Terpeliharanya jumlah fasilitas umum ASDP	3 unit
35	Peyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Perubahan PERDA No. 7 Tahun 2015, No 3 Tahun 2013 dan No. 4 Tahun 2013)	156.740.000,00	Tersusunnya PERDA	3 perda
36	Peyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi	136.000.000,00	Tersusunnya PERDA	2 perda

	Penyebrangan (Perubahan PERDA No.8 Tahun 2015, No 9 Tahun 2015)			
VII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
37	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	37.050,000,00	Terbangunnya Terminal	1 unit
38	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	345.250.000,00	Terbangunnya tambatan perahu	4 unit
39	Pengadaan Mobil Angkutan Pendesaan (ANGKODES) dan DAK	1.174.500.000,00	Tersedianya angkodes	4 unit
VIII	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	880.000.000,00		
40	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	1.286.450.000,00	Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas	10 paket
41	Penyediaan Lampu Jalan Kota	1.991.000.000,00	Tersedianya lampu jalan kota	7 paket
IX	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	880.000.000,00		
42	Pengadaan alat-alat KIR Bermotor	42.900.000,00	Jumlah Buku KIR	1.300 buku dan 1.300 stiker
		7.795.100.000,00		

C. Evaluasi Capaian Renstra

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel V.

Tabel IV
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan	Indikator Kinerja (out come) Program Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2019	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				URUSAN WAJIB									
1	02	09		PERHUBUNGAN									
			01	Program Peningkatan Pelayanan	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Registrasi dan Pendataan Kendaraan Motor	Tersediannya data regitsrasi dan data motor air	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			3	Pengawasan dan Patroli Sungai dan	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalur Sungai dan Danau	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat pengguna jalur Air	5	5	5	5	100%	5	5	100%
			5	Pengoperasiaan Bus Sekolah	Terlaksananya angkutan sekolah	2	2	2	2	100%	2	2	8%

			6	Pelayanan KIR Keliling	Terlayannya pengguna jasa KIR di Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	1000%
			7	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	2	2	2	2	100%	2	2	100%
			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung	Tersedianya Halte untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan	200	84	23	23	100%	30	30	15%
			2	Pengadaan Angkutan Pedesaan (ANGKUIDES)	Terlaksananya Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan	23	1	5	1	20%	10	5	22%
			3	Penyediaan Jasa Konsultasi dan	Tersedianya Data Desain dan Kelayakan Dermaga	5	1	4	1	25%	5	5	100%
	03	03		Pengendalian dan Pengamanan	Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas	Terpasangnya rambu-rambu sungai dan danau	400	75	23	23	100%	50	40	10%
			2	Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalan	1200	345	165	165	100%	100	165	14%
	04	04		Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan	Capaian Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pengadaan Alat-alat KIR	Tersedianya Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	20	8	8	8	100%	5	8	40%
	05	05		Peningkatan Pengembangan Sistem	Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%

			1	Penyusunan Laporan Capaian	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Penyusunan Pelaporan	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			3	Penyusunan Rencana	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA DISHUB	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Pendataan dan	Tersusunnya data asset DISHUB	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			5	Penyusunan Rencana	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			6	Pemantuan dan Pengendalian	Terlaksanakannya Pemantauan dan Pengendalian Program kerja setiap bidang	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			7	Penyusunan Pembuatan Sertifikat	Terlaksanakannya Pembuatan Sertifikat Tanah terminal dan balik nama sertifikat tanah	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		06	06	Peningkatan Kapasitas	Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya kemampuan Aparatur Dishub								
		07	07	Peningkatan Sarana dan	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pemeliharaan Rutin / Berkala	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pekerjaan kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		08	08	Pelayanan Administrasi	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100%	12	12	100%

			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Terpenuhi Kebutuhan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Terlaksananya Kelengkapan Surat menyurat Kendaraan Dinas/Operasional	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Penyediaan Jasa	Prosentase kegagalan dalam pelaksanaan administrasi keuangan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			5	Penyediaan Jasa Pengamanan	Terwujudnya kebersihan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			6	Penyediaan Jasa	Meningkatnya kualitas sarana kerja agar lebih produktif	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			7	Penyediaan Alat Tulis	Terwujudnya Peningkatan Administrasi Perkantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			8	Penyediaan Barang	Terwujudnya tingkat kecukupan kebutuhan kantor atas barang	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			9	Penyediaan Komponen Instalasi	Terlaksannanya Peningkatan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			10	Penyediaan Peralatan dan	Tingkat kecukupan tersedianya peralatan dan perlengkapan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			11	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Terpenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			12	Penyediaan Makanan dan	Terwujudnya pemenuhan atas kebutuhan makan dan minum	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			13	Rapat-Rapat Koordinasi &	Tingkat kesesuaian pelaksana tugas pokok dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%

		14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		15	Penyediaan Administrasi Pengadaan	Prosentase kegagalan pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		16	Penyusunan RKA dan DPA	Meningkatnya kesesuaian sasaran dengan tugas dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		17	Penyediaan Jasa	Meningkatnya pelayanan administrasi dikantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		18	Penyediaan Jasa Publikasi	terpenuhinya keperluan spanduk dan iklan koran	60	12	12	12	100%	12	12	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Tabel V.

Tabel V
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun	
					2016	2017	2018	2019	2010		2016	2017	2018	202
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Urusan Perhubungan													
A	SPM													
1	Tersedianya angkutan umum yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	75		%	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,
2	Tersedianya angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dengan wilayah yang telah berkembang yang telah tersedia jaringan jalan	23		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100		%	8	50	100	100	100	100	8	50	100	10
4	Tersedianya terminal angkutan yang telah dilayani angkutan umum	40		%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60		%	13	15	16	17	18	18	12,7	14,5	17	18
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 1000 (se ribu) kendaraan wajib uji.	60		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10

7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal	50		%	65	65	65	65	65	65	65	65	100	10
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Parkir pada Kabupaten/Kota.	40		%	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
11	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	10
B	IKK													
1	Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)		-	%	6,1	3,3	5	5	5	5	6,1	3,3	5	5
C	Indikator Kinerja RPJMD													
1	Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan			%	61,88	78,55	78,74	95,25	95,49	95,49	61,88	78,55	95,25	95,49
2	Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas			%	38,62	39,08	39,41	40,21	40,7	40,7	38,62	39,08	40,21	40,
3	Capain peningkatan pelayanan angkutan			%	74,8	77,83	77,83	77,83	80,87	80,87	74,8	77,83	77,83	80,87

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, social budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah :

1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
3. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi social dan sumber-sumber informasi masyarakat.

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya :

1. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
3. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
4. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
5. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan diwilayah Kabupaten;

6. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
7. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten pada bidang perhubungan.

Adapun faktor - faktor pendorong dalam pelayanan Dinas Perhubungan untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah:

1. Adanya visi dan misi dinas.
2. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan perhubungan .
3. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
4. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
5. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ;
4. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi dibidang perhubungan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalantol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tataruang.

2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan

3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada

Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan
2. Terwujudnya Pelayanan Perhubungan dan Lalu Lintas yang LAIK dan berkualitas

b. Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

B. Program dan Kegiatan

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan adalah 9 program, terdiri 5 program Setiap SKPD dan 4 program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 52 kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2021 sumber dana APBD Kabupaten, dan APBN sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Pengadaan Mebeleur Kantor
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13. Penyediaan makanan dan minuman
14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15. Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
16. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
17. Penyusunan RKA dan DPA
18. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
19. Penyediaan Jasa Publikasi
20. Penyusunan Perda tentang Retribusi Kepelabuhan
21. Penyusunan Perda tentang Ijin Trayek

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Rehabilitasi sedang/bera rumah gedung kantor
3. Pengadaan mobil Sktlift

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Pengadaan Pakaian Seragam Resemi (PSR)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari :

1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2. Pendataan dan pengelolaan Aset Dinas Perhubungan
3. Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan
4. Penyusunan LPPD Dinas Perhubungan
5. Penyusunan Administrasi Kepegawaian di lingkungan SKPD
6. Penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari :

1. Manajemen lalu lintas sungai dan danau
2. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan

3. Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan lokasi parkir
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ASDP
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Umum ASDP
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Umum LLAJ
7. Pelayanan KIR keliling
8. Pengawasan dan Patroli lalu lintas

8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari :

1. Penyediaan Moda Transportasi Perdesaan (jumlah Angkudes)
2. Penyediaan Moda Transportasi Perairan
3. Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Pekerjaan pembangunan Halte Sungai, tambatan perahu, steigher dan dermaga apaung mini)
4. Pembangunan tambatan Perahu/Lanting

9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat
2. Penyediaan lampu jalan kota

10. Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

• Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana Tabel XIII di bawah.

Tabel XIII
Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Target
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	90.000.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	8.000.000
3	Retribusi Terminal	

	Pelayanan tempet parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis	27.500.000
4	Retribusi Pelabuhan	
	Restribusi Jasa ke Pelabuhan	49.500.000
5	Restribusi Penyeberangan air	
	Restribusi Penyeberangan air	5.500.000
6	Restribusi Izin Trayek	
	Restribusi Izin Trayek Angkutan Umum	5.500.000
Jumlah		271.000.000

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Bidang Perhubungan	Propinsi dan Luar Propinsi						
	Pendidikan dan Pelatihan Forlma	Prosentase Aparatur yang mengikuti diklat							
		Pendidikan dan Pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	1 Orang	30.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Analisis Dampak Lalu Lintas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Analis Dampak lalu Lintas	1 Orang	30.000.000

		Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Bidang LLAJ	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Penyidik di Bidang LLAJ	1 Orang	30.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Menejemen Terminal	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Mempawah	2 Orang	20.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Menejemen Terminal	2 Orang	20.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor	1 Orang	30.000.000
		Pendidikan dan pelatihan Registrasi Sertifikasi Kapal	Balai Pelatihan Pengembangan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang	1 Orang	30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Sertifikasi untuk Registrasi Kapal	1 Orang	30.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) LLASDP	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat Bali	1 Orang	30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Penyidik di Bidang LLASDP	1 Orang	30.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Penilai Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan	1 Orang	30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Penilai Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	1 Orang	30.000.000

		Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Sungai dan Danau	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan	1 Orang	30.000.000	APBD II	Belum Tersedianya Tenaga Pengelola Sungai dan Danau	1 Orang	30.000.000
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Kapuas Hulu						
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan							
	Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan	Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan	Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir	1 Unit	300.000.000	DAK	Desa Tertinggal, Potensi Daerah Wisata, Pusat Kerajinan Rakyat, Daerah Perikanan	-	-
			Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu	1 Unit	300.000.000	DAK	Desa Pusat Pertanian, Perkebunan dan Lokasi Transmigrasi	-	-
			Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir	1 Unit	300.000.000	DAK	Calon Desa Mandiri, Potensi Perkebunan	-	-
			Desa Kepala Gurung Kecamatan Silat Hulu	1 Unit	300.000.000	DAK	Desa Sangat Tertinggal	-	-
			Desa Entebi Kecamatan Jongkong	1 Unit	300.000.000	DAK	Desa Sangat Tertinggal	-	-

	Pengadaan Kapal Motor/Motor Bandung	Pengadaan Kapal Motor/Motor Bandung	Desa Lanjak Deras kec. Batang Lupar	1 Unit	800.000.000	DAK	Calon Desa Mandiri, Potensi Daerah Wisata, Pusat Kerajinan Rakyat, Daerah Perikanan	-	-
	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal	Pembangunan Terminal Type C	Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara	1 Paket	3.500.000.000	APBD II	Pusat Pemberhentian, Pemberangkatan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perintis	1 Paket	500.000.000
		Pembangunan Terminal Type C	Desa Nanga Bunut Kec. Bunut Hilir	1 Paket	2.000.000.000	APBD II	Pusat Pemberhentian, Pemberangkatan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perintis	1 Paket	250.000.000
	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting dan Dermaga	Pembangunan Dermaga Penyeberangan	Desa Perigit Kec. Silat Hilir	1 Paket	20.000.000.000	DAK/APBN	Penyeberangan menuju Kecamatan di Perbatasan	1 Paket	400.000.000
		Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Nanga Lauk Kec. Embaloh Hilir	1 Unit	160.000.000	APBD II	Desa Tertinggal, Potensi Daerah Wisata, Pusat Kerajinan Rakyat, Daerah Perikanan	-	-
			Desa Teluk Aur Kec. Bunut Hilir	1 Unit	160.000.000	APBD II	Desa Tertinggal, Daerah Perikanan	-	-
			Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau	1 Unit	160.000.000	APBD II	Calon Desa Mandiri	-	-

			Desa Marsedan Kec. Semitau	1 Unit	160.000.000	APBD II	Calon Desa Mandiri	-	-
			Desa Pangeran Kec. Silat Hilir	1 Unit	160.000.000	APBD II	Calon Desa Mandiri	-	-
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase Isyarat Pengamanan Lalu Lintas Dalam Kondisi Baik						-	-
		Prosentase Pemenuhan Isyarat Pengaman Lalu Lintas						-	-
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Sungai dan Danau	Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu Sungai dan Danau	Kawasan Danau Sentarum	1 Paket	400.000.000	APBD II	Penunjang Kawasan Wisata di Kawasan danau Sentarum	1 Paket	200.000.000
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu Darat	Jalan Kabupaten dan diIbu Kota Kecamatan Perbatasan	400 Buah	800.000.000	APBD II	Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	200 Buah	400.000.000
	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan	5 Paket (Kec. Badau, Kec. Putussibau Utara, Kec Putussibau Selatan, Kec. Hulu Gurung dan Kec Jongkong	1.500.000.000	APBD II	Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	4 Paket	1.200.000.000
		Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu	23 Kecamatan	2.300.000.000	APBD II	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Kota	23 Kecamatan	2.300.000.000
		Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jembatan Uncak Kapuas	Jembatan Uncak Kapuas Putussibau	1 Paket	650.000.000	APBD II	Penunjang keindahan Kota Putussibau	-	-

	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Ibu Kota Kabupaten	4 Paket/Lokasi	1.200.000.000	APBD II	Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	2 Paket	800.000.000
	Pengadaan Mobil Skylife	Pengadaan Mobil Skylife	Ibu Kota Kabupaten	1 Unit	1.200.000.000	APBD II	Penunjang Operasional Perawatan PJU	-	-
JUMLAH					6.850.000.000				4.300.000.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan. Renja Tahun 2021 ini merupakan tahun ke – 5 pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu serta peran aktif stakeholder terkait.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Kab. Kapuas Hulu,

Putussibau, Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Drs. H. ABDUL KARIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 199403 1 001